

BAB 5

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bab ini, bagian pertama menjelaskan kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil temuan dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan ulang pentingnya analisis posisi antara pengkritik dan pemerintah daerah yang dikritiknya dan sikap yang direalisasikan oleh pengkritik dalam transkripsi video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Bagian kedua memberikan beberapa saran untuk penelitian sebelumnya.

1.1.Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap posisi pengkritik dan sikap pengkritik yang teridentifikasi dalam video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: (1) bagaimana pengkritik memosisikan dirinya secara interpersonal sebagaimana terealisasi dalam transkripsi video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah?; dan (2) apa saja sikap yang direalisasikan oleh pengkritik dalam transkripsi video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah?

Terkait dengan pertanyaan penelitian pertama, penelitian ini mengidentifikasi bahwa secara interpersonal, terdapat dua posisi antara pengkritik dengan pemerintah daerah yang dikritiknya, yaitu setara dan tidak setara. Posisi setara antara pengkritik dan pemerintah daerah yang dikritiknya terealisasi dalam tipe mood (*mood type*) dan fungsi Tutur (*speech function*) yang digunakan dalam transkripsi video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang digunakan dalam data penelitian. Hal tersebut bisa dilihat dari dominasi penggunaan tipe mood dengan jenis indikatif – berjumlah 82% (210 klausa) dan fungsi Tutur dengan pola memberi – informasi – pernyataan berjumlah 82% (210 klausa). Kesetaraan posisi antara pengkritik dengan pemerintah daerah yang dikritiknya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) peran media sosial yang menciptakan ruang publik baru; (2) ketidakhadiran langsung pihak yang dikritik; (3) meningkatnya kesadaran politik masyarakat; (4) pergeseran paradigma kekuasaan di era digital.

Sementara itu, posisi yang tidak setara antara pengkritik dengan pemerintah daerah yang dikritiknya juga ditemukan dalam data penelitian. Meskipun begitu, posisi yang tidak setara antara pengkritik dengan pemerintah daerah yang dikritiknya tampak pada beberapa bagian tertentu saja. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya penggunaan modulasi jenis obligasi dengan tingkatan tinggi. Penggunaan modulasi dengan jenis obligasi yang tingkatannya tinggi ini menunjukkan posisi pengkritik lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang merupakan objek yang dikritiknya. Selain itu, adanya penggunaan tipe mood dengan jenis imperatif dan fungsi Tutar dengan pola meminta – barang dan jasa – imperatif juga menunjukkan posisi pengkritik lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang merupakan objek yang dikritiknya.

Untuk pertanyaan penelitian kedua, penelitian ini mengidentifikasi bahwa sikap (*attitude*) yang terdapat dalam penelitian meliputi penghakiman (*judgement*), apresiasi (*appreciation*), afek (*affect*). Hasil analisis data menemukan bahwa aspek penghakiman (*judgement*) mendominasi dalam transkripsi video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Apresiasi (*appreciation*) menjadi aspek terbanyak kedua setelah penghakiman. Terakhir, afek (*affect*) menjadi aspek yang jumlahnya terendah. Aspek sikap (*attitude*) dalam sistem appraisal yang didominasi oleh penghakiman (*judgement*) sebanyak 48% juga menguatkan temuan tentang masyarakat sebagai orang yang mengkritik memosisikan diri mereka setara, bahkan cenderung lebih dominan pada penelitian ini. Penggunaan penghakiman (*judgement*) yang tinggi menandakan bahwa penutur merasa memiliki kapasitas dan hak untuk menilai perilaku pihak lain.

Kesimpulannya, posisi pengkritik terhadap pemerintah daerah dalam video kritik yang dianalisis cenderung setara. Meskipun posisi setara mendominasi, ditemukan juga beberapa bagian yang menunjukkan adanya posisi pengkritik yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang dikritiknya. Sikap (*attitude*) yang paling dominan dalam kritik adalah penghakiman (*judgement*), diikuti oleh apresiasi (*appreciation*), dan afek (*affect*). Hal ini menunjukkan bahwa pengkritik cenderung menilai kebijakan pemerintah daerah berdasarkan standar etika, moral, atau kinerja tertentu.

1.2.Implikasi

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga area. Pertama, dalam konteks pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan potensi demokratisasi komunikasi politik yang lebih besar ketika warga negara memiliki akses dan keberanian lebih untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal itu bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh warga-warganya. Selain itu, pergeseran dinamika kekuasaan ini bisa memengaruhi cara pemerintah daerah berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mendorong mereka untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan dialogis. Kedua, dalam konteks pendidikan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum tentang penyampaian kritik. Hal tersebut bisa dijadikan bahan referensi penggunaan bahasa dalam kritik yang bisa digunakan atau tidak digunakan. Ketiga, dalam konteks penelitian itu sendiri, penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan penting untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

1.3.Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa lelucon dan batasan yang peneliti alami. Pertama, penelitian ini menggunakan jumlah data yang sedikit dan hasil temuan ini mungkin tidak bisa disamakan dengan jenis kritik yang lain. Hal tersebut terjadi karena peneliti membatasi durasi waktu yang ditetapkan saat mencari dan menemukan video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan data dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini tidak mengkaji data dari perspektif multimodalitas. Penggunaan perspektif tersebut bisa memperluas dan memperdalam penelitian ini sehingga hasilnya pun akan lebih komprehensif.

1.4.Rekomendasi

Terdapat beberapa aspek yang perlu dieksplorasi saran yang dapat diambil dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya terkait analisis video kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pertama, penelitian selanjutnya dapat meningkatkan cakupan data yang digunakan dengan jumlah yang lebih banyak dan jenis kritik yang lebih beragam. Kedua, penelitian selanjutnya dapat mencoba untuk

Yunita Ayuningsih, 2024

VIDEO KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH: KAJIAN MAKNA INTERPERSONAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membandingkan kritik yang disampaikan melalui media sosial dan kritik yang disampaikan secara langsung. Penelitian tersebut dapat mengungkap karakteristik dari kritik yang disampaikan melalui media sosial dan kritik yang disampaikan secara langsung sama atau berbeda. Ketiga, penelitian yang berfokus pada respons pemerintah daerah terhadap kritik yang disampaikan melalui media sosial juga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak fenomena itu. Penelitian seperti itu juga dapat mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah mengadaptasi strategi komunikasi dan kebijakan mereka sebagai respons terhadap kritik yang disampaikan kepada mereka melalui media sosial. Kelima, penelitian menggunakan analisis modalitas terhadap video kritik yang disampaikan untuk pemerintah daerah dapat memberikan hasil penelitian yang lebih lengkap dan mendalam dibandingkan penelitian yang hanya menganalisis transkripsinya.

Dengan mengeksplorasi kelima hal yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya, diharapkan pemahaman kita tentang hubungan antara pengkritik dan pemerintah daerah yang dikritiknya secara interpersonal semakin komprehensif. Dengan demikian, hal tersebut dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang mendukung partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.